

**KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
PROVINSI SULAWESI BARAT**

ANDI HAMRI ARDIANSYAH

NPP. 30.1569

*Asdaf Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat*

*Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah*

Email: [Andihamriardiansyah25@gmail.com](mailto:Andihamriardiansyah25@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Dra. Nur Handayani, M.Si

**ABSTRACT**

**“THE PERFORMANCE OF THE DEPARTEMENT OF ENVIRONMENT AND  
FORESTRY IN WASTE MANAGEMENT IN POLEWALI MANDAR REGENCY WEST  
SULAWESI PROVINCE”**

**Problem Statement/Background (GAP):** The amount of waste generation in Polewali Mandar Regency in 2021 is 48.03% of the total population of 483,920.00, indicating that waste management is not yet good. While PP No. 97 of 2017 Article 5 paragraph 1 concerning the National Strategy Policy for the Management of Household Waste and Household-like Waste, which targets 30% of waste generation. **Purpose:** Therefore this study aims to determine and describe the performance of DLHK, inhibiting factors, and efforts in waste management in Polewali Mandar Regency. **Method:** Writing this thesis using a type of qualitative research descriptive method with an inductive approach. Data collection techniques used by the author are interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques used in writing this thesis consist of data reduction, data presentation, drawing conclusions or verification. **Result:** In accordance with Mahsun's theory, the results of this study concluded that the performance of the Polewali Mandar Regency Environment and Forestry Service in waste management was still not optimal because it had not reached the goals, vision and mission, as well as the performance targets set by DLHK Polewali Mandar Regency. This is due to the inhibiting factors encountered such as the lack of public awareness in disposing of waste, the closed landfill, limited facilities and infrastructure, lack of cooperation between local government and the community, and no strict sanctions. **Conclusion:** Therefore, it is hoped that DLHK of Polewali Mandar Regency will try to overcome the performance of waste management such as taking advantage of community empowerment, making a new TPA, increasing the budget, providing facilities and infrastructure, increasing cooperation, and giving strict sanctions to violators.

**Keywords:** Performance, Waste Management, waste generation

## ABSTRAK

### “KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT”

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP)** Banyaknya timbulan sampah di Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2021 48,03% dari jumlah penduduk 483,920,00 menunjukkan belum baiknya tatakelola persampahan. Sementara PP No. 97 Tahun 2017 Pasal 5 ayat 1 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang menargetkan jumlah timbulan sampah sebesar 30%. **Tujuan:** penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Kinerja DLHK, faktor penghambat, serta upaya dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Polewali Mandar. **Metode:** Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. **Hasil/Temuan:** Sesuai dengan teori Mahsun hasil dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar dalam pengelolaan sampah masih belum optimal dikarenakan belum mencapai tujuan, visi dan misi, serta target kinerja yang ditetapkan DLHK Kabupaten Polewali Mandar. Hal tersebut disebabkan karena adanya faktor penghambat yang dihadapi seperti kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membuang sampah, tertutupnya TPA, sarana dan prasarana yang terbatas, kurangnya kerjasama antara pemerintah daerah hingga masyarakat, dan tidak ada sanksi yang tegas. **Kesimpulan:** Oleh karena itu diharapkan DLHK Kabupaten Polewali Mandar berupaya untuk mengatasi kinerja pengelolaan sampah seperti memanfaatkan pemberdayaan masyarakat, membuat TPA baru, penambahan anggaran, menyediakan sarana dan prasarana, meningkatkan kerjasama, dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar.

**Kata kunci:** Kinerja, Pengelolaan Sampah, Timbulan Sampah

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sampah adalah salah satu permasalahan yang cukup kompleks yang dihadapi oleh sejumlah negara, termasuk negara Indonesia. Masalah sampah bukan hanya sekedar masalah lingkungan, akan tetapi sudah menjadi masalah sosial yang nantinya akan menimbulkan

konflik. Tahun 2019 jumlah tumpukan sampah di Indonesia mencapai 29.140.000 ton pertahun dengan jumlah penduduk 270.6 juta jiwa. Tahun 2020 jumlah tumpukan sampah yang ada di Indonesia mencapai 32.820.000 ton pertahunnya dengan jumlah penduduk mencapai 273,5 juta jiwa dan tahun 2021 jumlah timbulan sampah yang ada di Indonesia mencapai 21.880.000 ton pertahun dengan jumlah penduduk mencapai 275,7 juta jiwa. (sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat, Indonesia menghasilkan 21,88 juta ton sampah pada tahun 2021. Jumlah tersebut menurun 33,33% dibanding pada tahun sebelumnya sebanyak 32,82 juta ton. Kondisi ini berbeda dengan tahun 2020 dimana jumlah sampah justru meningkat 12,63%. Sementara, jumlah timbulan sampah pada tahun 2019 sebanyak 29,14 juta ton. Hal tersebut menunjukkan bertambahnya jumlah penduduk berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah timbulan sampah yang semakin meningkat. Hal inipun terjadi di Kabupaten Polewali Mandar.

Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah menegaskan bahwa dalam pengelolaan sampah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah serta melakukan koordinasi antar instansi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terjadi keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Beberapa permasalahan yang dihadapi menjadi potret buruk tata kelola persampahan di Polewali Mandar, padahal kabupaten ini memiliki julukan Polman Berhias yang merupakan akronim dari bersih, rapih, indah, aman dan asri. Permasalahan tersebut antara lain :

1. Belum adanya tindakan prioritas yang saling memperkuat memerangi sampah pada skala lingkungan desa, kecamatan hingga perbatasan wilayah.
- 2..Belum adanya inisiatif pengomposan tingkat masyarakat desa yang dimulai dari rumah tangga.
3. Tidak optimalnya kampanye sanitasi dimulai pada tingkat rumah tangga, khususnya di pedesaan terkait pemahaman masyarakat tentang sampah, sehat perilaku dan mengurangi praktik membuang sampah pada sembarang tempat.
4. Belum optimalnya upaya pencegahan sampah yang dimulai dari sumbernya dengan mempertimbangkan pengurangan barang-barang berbahan plastik.
5. Belum adanya peran aktif masyarakat secara berkelanjutan terhadap upaya pemantauan dan pengelolaan sampah secara sistematis.
6. Tidak adanya pengelolaan air lindi yang ditangani secara baik, seperti air lindi yang berasal dari TPA Binuang, bahkan cenderung dibiarkan begitu saja dari tahun ke tahun.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah harus menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Dalam kegiatan penanganan sampah dapat dilakukan juga dengan cara sebagai berikut:

1. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
2. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ketempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
3. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
4. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.

5. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengambilan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. (pasal 22 UU No. 18 Tahun 2008) Pada kegiatan pemilahan, pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar terutama di pasar tradisional sudah ditangani dengan baik yaitu dengan memisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Hal tersebut dilakukan agar tercipta lingkungan yang bersih dan bebas dari sumber penyakit.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar bersama pihak kecamatan dan relawan setiap hari melakukan pengolahan melalui penghancuran sampah, sebanyak lima kontainer sampah campuran yang berhasil dikumpulkan kemudian digiling menggunakan mesin penghancur sampah yang nantinya limbah sampah tersebut dimanfaatkan menjadi material timbunan yang berguna bagi masyarakat.

Tempat pengumpulan sampah (TPA) yang ada di Kabupaten Polewali Mandar masih sangat terbatas dan tidak cukup untuk menampung sampah dari masyarakat Polewali Mandar yang menyebabkan sampah tersebut berakhir di sejumlah titik pemukiman warga. Contohnya di Pasar Induk Kecamatan Wonomulyo yang tumpukannya menimbulkan bau busuk karena lambat ditangani.

Diharapkan pemerintah dan pemerintah daerah memberikan edukasi kepada masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar, dan juga peran masyarakat untuk lebih menjaga lingkungan dengan cara mengurangi pemakaian sampah plastik dan mengelolah sampah sehingga bernilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “ **KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**”

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi menjadi potret buruk tata kelola persampahan di Polewali Mandar, padahal kabupaten ini memiliki julukan Polman Berhias yang merupakan akronim dari bersih, rapih, indah, aman dan asri. Permasalahan tersebut antara lain :

1. Belum adanya tindakan prioritas yang saling memperkuat memerangi sampah pada skala lingkungan desa, kecamatan hingga perbatasan wilayah.
2. Belum adanya inisiatif pengomposan tingkat masyarakat desa yang dimulai dari rumah tangga.
3. Tidak optimalnya kampanye sanitasi dimulai pada tingkat rumah tangga, khususnya di pedesaan terkait pemahaman masyarakat tentang sampah, sehat perilaku dan mengurangi praktik membuang sampah pada sembarang tempat.
4. Belum optimalnya upaya pencegahan sampah yang dimulai dari sumbernya dengan mempertimbangkan pengurangan barang-barang berbahan plastik.
5. Belum adanya peran aktif masyarakat secara berkelanjutan terhadap upaya pemantauan dan pengelolaan sampah secara sistematis.
6. Tidak adanya pengelolaan air lindi yang ditangani secara baik, seperti air lindi yang berasal dari TPA Binuang, bahkan cenderung dibiarkan begitu saja dari tahun ke tahun.
7. Tertutupnya Tempat Pembuangan Akhir yang ada di Kabupaten Polewali Mandar menyebabkan sampah yang ada menjadi berserakan di bahu jalan.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Taufiqurrahman pada tahun 2016 dengan penelitian yang berjudul “Optimalisasi Pengelolaan Sampah Berdasarkan Timbulan dan Karakteristik di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang”. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan upaya optimalisasi dalam proses pengolahan sampah yang ditinjau berdasarkan timbulan dan karakteristik sampah dan kondisi lahan. Adapun Hasil dari penelitian ini yakni dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan kepada masyarakat kecamatan Pujon dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rencana peningkatan kualitas lingkungan. Juga diharapkan bisa ikut meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Rike Martha Yulia pada tahun 2020 dengan penelitian yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat efektivitas pelaksanaan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar dengan upaya dapat meningkatkan mutu pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar, dan apa saja faktor penghambat dan tantangan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Besar. Adapun hasil dari penelitian ini yakni Ketetapan sasaran dan tujuan pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Besar belum maksimal dalam menunjang lingkungan bersih, sehat dan tertata rapi dikarenakan hanya beberapa gampong dari 16 kecamatan yang mengikuti kerjasama dengan DLH dalam pengelolaan sampah.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Dedy Ardiansyah pada tahun 2016 dengan penelitian yang berjudul “Kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan sampah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan sampah dan faktor yang mempengaruhinya. Adapun hasil dari penelitian ini yakni temuan data di lapangan menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan sampah selama ini sangat baik dalam menanganinya. Hal ini dapat dilihat dari respon dan kesigapan pegawai dalam memecahkan masalah di masyarakat.

### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang lebih luas. Penelitian yang dilakukan lebih berfokus kepada Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar terhadap Pengelolaan Sampah.

### **1.5 Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian skripsi ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Polewali Mandar.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Polewali Mandar.

3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Polewali Mandar.

## II. METODE

Menurut Hamid Darmadi (2014:153) menjelaskan bahwa “setiap penelitian kualitatif pemerintahan, bentuk desain penelitian dimungkinkan bervariasi karena disesuaikan dengan bentuk alami dari penelitian kualitatif itu sendiri yang mempunyai sifat *emergent* dimana fenomena tiba tiba muncul sesuai dengan prinsip alami. Pada dasarnya fenomena muncul apa adanya sesuai dengan yang dijumpai oleh seorang peneliti dalam proses penelitian di lapangan”. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik deskriptif. Teknik Pengumpulan Data dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik Analisis Data menggunakan teknik Miles dan Huberman dalam Simangungsong (2017:226) yang terdiri dari tiga alur kegiatan yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat

Penulis menganalisis Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dari segi landasan teoritik menggunakan pendapat dari Mahsun (2013:25) yang menyatakan kinerja organisasi dapat diukur melalui tiga dimensi yaitu: Organisasi, Kinerja, dan Evaluasi Kinerja. Dan dari segi landasan legalistik menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolan Sampah yang terdiri dari dua dimensi yakni: Penanganan sampah dan Pengurangan sampah.

#### A. Landasan Teoritik

##### 1. Organisasi

Bagi organisasi, indikator-indikator tersebut mutlak diperlukan. Bahkan dalam tataran individupun seringkali menetapkan indikator-indikator yang harus dicapai. Salah satu kriteria yang penting ditunjukkan melalui rumusan indikator yang mampu mencerminkan apa yang menjadi tujuan, sasaran, dan strategi. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar mengharapkan berkurangnya timbulan sampah yang ada sehingga tidak menimbulkan permasalahan persampahan yang akan berdampak bagi masyarakat, dan meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan.

##### 2. Kinerja

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Untuk menilai keberhasilan dari organisasi maka diperlukanya suatu ukuran kinerja organisasi. Berkenaan dengan ukuran kinerja organisasi dalam pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Polewali mandar merujuk kepada peningkatan kelestarian lingkungan hidup yang dimana target tersebut haruslah tercapai.

##### 3. Evaluasi kinerja

Evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima informasi mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai organisasi. Capaian kinerja organisasi dapat dinilai dengan skala

pengukuran yakni: penilaian kemajuan organisasi, pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Berkenaan dengan penilaian kemajuan organisasi dalam pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Polewali mandar merujuk kepada tingkat kepuasan dari masyarakat itu sendiri mengenai pandangannya terhadap kinerja Instansi tersebut dalam menanggulangi dan mengatasi masalah persampahan yang sudah banyak di Kabupaten Polewali Mandar, dan dalam proses pengambilan keputusan yang baik haruslah dilakukan dengan cepat dan bijak oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar.

## **B. Landasan Legalistik**

### **1. Penanganan Sampah**

Penanganan sampah merupakan penyelenggaraan pengelolaan sampah yang meliputi: pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah.

#### **a. Pemilahan sampah**

Pemilahan sampah merupakan kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis. Dalam pemilahan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar dari fakta yang ada di lapangan bahwasanya untuk mengelompokkan sampah berdasarkan jenisnya sudah dilaksanakan dengan baik oleh instansi yang bersangkutan akan tetapi terdapat permasalahan lain dalam mengelompokkan sampah berdasarkan jenisnya yakni kurangnya kesadaran masyarakat tentang menjaga lingkungan untuk memilah sampah sesuai dengan jenisnya padahal Pemerintah Daerah dalam hal ini DLHK telah membuatkan tempat sampah sesuai dengan sumbernya yang terbuat dari ember dan kerajinan dari ban.

#### **b. Pengumpulan sampah**

Pengumpulan sampah merupakan proses pengambilan sampah dari wadahnya di tiap sumber yang dilakukan oleh petugas organisasi formal baik unit pelaksana dari pemerintah daerah, petugas daerah dari lingkungan setempat, maupun pihak swasta yang ditunjuk oleh pemerintah. Di Kabupaten Polewali Mandar sendiri proses pengumpulan sampah sudah terlaksana dengan baik hal ini di dasarkan pada setiap harinya pihak yang bertanggungjawab atas pengumpulan sampah sudah melaksanakan tugasnya untuk mengumpulkan sampah yang diambil dari masyarakat dan dibawa ke tempat pembuangan yang telah tersedia.

#### **c. Pengangkutan sampah**

Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau TPS menuju TPST dan TPA yang menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang telah didesain untuk mengangkut sampah. Berdasarkan fakta yang ada dilapangan di Kabupaten Polewali Mandar sendiri tidak memiliki TPA, hal ini di sebabkan karena TPA yang ada di Kabupaten Polewali Mandar telah ditutup oleh masyarakat pada tahun 2021. Hal tersebut membuat proses pengangkutan sampah yang ada di Kabupaten Polewali Mandar terhambat dan membuat sampah bertebaran di sekitaran bahu jalan.

#### **d. Pemrosesan akhir sampah**

Pemrosesan akhir sampah merupakan kegiatan pengambilan sampah dan residu hasil pengelolaan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Berdasarkan

fakta dilapangan yang dilihat langsung oleh peneliti dikarenakan TPA yang telah ditutup oleh masyarakat pemrosesan akhir sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar sendiri langsung membuat tempat pembuangan dengan metode sanitary landfill yang dimana metode ini merupakan salah satu alternatif yang digunakan oleh pihak DLHK kabupaten Polewali Mandar dalam menyiasati banyaknya tumpukan sampah yang ada.

## **2. Pengurangan Sampah**

Pengurangan sampah merupakan penyelenggaraan pengelolaan sampah yang meliputi: pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali.

### **a. Pembatasan timbulan sampah**

Pembatasan timbulan sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkan suatu produk atau kemasan produk sampai dengan kegunaan produk atau kemasan. Dalam mengatasi atau meminimalisasi timbulan sampah yang ada di Kabupaten Polewali Mandar, Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Polewali Mandar telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengurangan sampah melalui pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan atau minuman bahan plastik Kabupaten Polewali Mandar.

### **b. Pendaauran ulang sampah**

Pendaauran ulang sampah merupakan upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Selain dengan di berlakukannya Perbup Nomor 21 Tahun 2019 untuk mengurangi limbah plastik pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar juga untuk mengatasi permasalahan persampahan telah melaksanakan proses pembuatan paving blok dari limbah plastik, mengumpulkan kain bekas untuk dijadikan sebagai bahan kerajinan dan mengumpulkan bahan makanan untuk dijadikan sebagai pupuk organik yang dimana hal ini dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

### **c. Pemanfaatan kembali**

Pemanfaatan kembali sampah adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Dalam pengelolaan persampahan dalam hal ini melakukan pemanfaatan kembali sampah pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar telah memberlakukan proses pemanfaatan dengan cara mengumpulkan limbah untuk dijadikan sebagai bahan baku yang dapat dijadikan sebagai nilai tambah bagi masyarakat maupun Pemerintah Daerah.



### **3.2 Faktor Penghambat**

Secara umum faktor penghambat yang terjadi dalam Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat diantaranya yaitu:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah dengan benar dan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Hal ini dapat mengakibatkan tumpukan sampah yang tidak terkelola dengan baik.
2. Tertutupnya Tempat Pembuangan Akhir yang ada di Kabupaten Polewali Mandar.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam menunjang pengelolaan sampah di Kabupaten Polewali Mandar. Seperti fasilitas pengumpulan, dan transportasi. Ini membuat proses pengelolaan sampah menjadi kurang optimal.
4. Kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dalam hal pengelolaan sampah. Misalnya, kurangnya anggaran untuk program pengelolaan sampah.
5. Kurangnya kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta dan pemerhati lingkungan dalam hal pengelolaan sampah yang membuat proses menjadi kurang optimal.
6. Tidak adanya sanksi yang tegas bagi pelanggaran pengelolaan sampah.

### **3.3 Upaya yang dilakukan**

Dengan adanya faktor penghambat dalam dalam Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat maka upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi yakni:

1. Memaksimalkan pemberdayaan masyarakat terkait visi dan misi yang hendak dicapai untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
2. Membuat Tempat Pembuangan Akhir yang baru di Kabupaten Polewali Mandar.
3. Penambahan anggaran untuk pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Polewali Mandar
4. Penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang keberhasilan pengelolaan sampah.
5. Meningkatkan kerjasama antar pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta dalam hal pengelolaan sampah.
6. Memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggaran pengelolaan sampah.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pertama, Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Taufiqurrahman pada tahun 2016 dengan penelitian yang berjudul “Optimalisasi Pengelolaan Sampah Berdasarkan Timbulan dan Karakteristik di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang”. Adapun Hasil dari penelitian ini yakni dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan kepada masyarakat kecamatan Pujon dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rencana peningkatan kualitas lingkungan. Juga diharapkan bisa ikut meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Rike Martha Yulia pada tahun 2020 dengan penelitian yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar”. Adapun hasil dari penelitian ini yakni Ketetapan sasaran dan tujuan pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Besar belum maksimal dalam menunjang lingkungan bersih, sehat

dan tertata rapi dikarenakan hanya beberapa gampong dari 16 kecamatan yang mengikuti kerjasama dengan DLH dalam pengelolaan sampah.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Dedy Ardiansyah pada tahun 2016 dengan penelitian yang berjudul “Kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan sampah”. Adapun hasil dari penelitian ini yakni temuan data di lapangan menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan sampah selama ini sangat baik dalam menanganinya. Hal ini dapat dilihat dari respon dan kesigapan pegawai dalam memecahkan masalah di masyarakat.

Pembaharuan temuan penelitian sebelumnya dari penelitian terdahulu yakni Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan teori dari Mahsun pengelolaan sampah masih belum optimal dikarenakan belum mencapai tujuan, visi dan misi, serta target kinerja yang ditetapkan DLHK Kabupaten Polewali Mandar. Hal tersebut disebabkan karena adanya faktor penghambat yang dihadapi seperti kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membuang sampah, tertutupnya TPA, sarana dan prasarana yang terbatas, kurangnya kerjasama antara pemerintah daerah hingga masyarakat, dan tidak ada sanksi yang tegas. Oleh karena itu diharapkan DLHK Kabupaten Polewali Mandar berupaya untuk mengatasi kinerja pengelolaan sampah seperti memanfaatkan pemberdayaan masyarakat, membuat TPA baru, penambahan anggaran, menyediakan sarana dan prasarana, meningkatkan kerjasama, dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan berbagai informasi yang ada, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar dalam pengelolaan sampah masih belum optimal dikarenakan belum mencapai tujuan, visi dan misi, serta target kinerja yang ditetapkan DLHK Kabupaten Polman.

Beberapa faktor-faktor penghambat dan pendukung pengelolaan sampah. Faktor penghambat yang dihadapi seperti kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membuang sampah, tertutupnya TPA, sarana dan prasarana yang terbatas, kurangnya kerjasama antara pemerintah daerah hingga masyarakat, dan tidak ada sanksi yang tegas. Sedangkan faktor pendukung yaitu kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan limbah plastic pada Peraturan Bupati 21 Tahun 2019 tentang Pengurangan limbah plastic, sarana dan prasarana yang cukup memadai, adanya kesadaran disebagian masyarakat, ketersediaan tenaga kerja yang ahli dan terlatih, memanfaatkan teknologi yang ada.

DLHK Kabupaten Polman berupaya untuk mengatasi kinerja pengelolaan sampah seperti memanfaatkan pemberdayaan masyarakat, membuat TPA baru, penambahan anggaran, menyediakan sarana dan prasarana, meningkatkan kerjasama, memberikan sanksi tegas bagi pelanggar.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian, dimana peneliti hanya diberikan waktu 14 hari untuk mengidentifikasi permasalahan di lapangan serta membuat solusi permasalahan yang terjadi. Tidak hanya itu, dikarenakan waktu penelitian yang singkat peneliti keterbatasan untuk menjangkau ruang lingkup penelitian yang lebih luas dalam mengidentifikasi permasalahan terkait kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Polewali Mandar.

**Arah Masa Depan Penelitian (future work).** Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada

lokasi serupa berkaitan dengan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini diperuntukkan agar permasalahan yang ditemukan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Polewali Mandar sehingga dapat mengatasi masalah persampahan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar.

#### **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Peneliti mengucapkan terimakasih serta penghargaan setinggi-tingginya kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat serta jajaran, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

#### **VI. DAFTAR PUSTAKA**

- Darmadi, Hamid. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Mahsun. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPF
- Simangunsong, F. (2017). *Metode Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.

